

BAB I

PENDAHULUAN

Judul “Kegagalan Zimbabwe dalam Memanfaatkan Peluang dari Fenomena Globalisasi” diambil dengan pertimbangan bahwa isu globalisasi merupakan isu yang sangat fenomenal dan cukup besar pengaruhnya pada kehidupan masyarakat global. Fenomena ini seharusnya dijadikan peluang yang besar bagi negara – negara dengan pendapatan rendah untuk meningkatkan pendapatannya, yang salah satunya adalah Zimbabwe. Hal yang menarik adalah Zimbabwe merupakan negara *landlocked*, dengan tingkat populasi yang tinggi dan juga sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan dengan baik, namun masih tetap menjadi negara dengan pendapatan yang rendah dibandingkan negara lainnya. Sehingga, penulis merasa hal ini perlu diteliti lebih lanjut, apa yang menyebabkan Zimbabwe gagal dalam memanfaatkan peluang fenomena globalisasi tersebut.

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi merupakan produk perkembangan ilmu pengetahuan, daya inovasi, dan teknologi yang semakin mengecilkan arti tapal batas politik dan geografi. Fenomena ini juga merupakan hasil dari perubahan – perubahan besar di dunia finansial, manajemen perusahaan dan tata kelola modern yang semakin terbuka serta demokratis. Pada tingkat yang fundamental, globalisasi didorong oleh adanya sifat manusia yang selalu ingin lebih tahu, lebih bebas,

lebih maju serta lebih mampu berhubungan dengan manusia – manusia lainnya di tempat yang berbeda.¹

Bagi kaum pendukung globalisasi, seperti Jagdish Bhagwati, Stanley Fischer, Douglas Irwin, Thomas Friedman, Brink Lindsey, John Micklethwait, Adrian Wooldridge dan Martin Wolf, perkembangan globalisasi telah membawa manfaat yang sangat besar bagi umat manusia, bukan hanya dalam memicu pertumbuhan ekonomi, mengubah struktur produksi menjadi lebih efisien dan mengangkat taraf hidup masyarakat saja, tetapi juga memberikan manfaat dalam mendorong pemerataan dan membantu masyarakat miskin untuk keluar dari kemiskinan. Contoh terbaik yang dikeluarkan oleh mereka adalah China dan India, setelah kedua negara ini membuka pintu bagi perdagangan dan investasi serta mendorong langkah – langkah integrasi dengan perekonomian dunia yang semakin intensif, ratusan juta warga berhasil mengangkat nasib mereka untuk keluar dari kemiskinan dan ratusan juta lainnya kini memiliki kesempatan untuk melakukan hal yang sama.² Begitu juga dengan data dalam tabel berikut :

¹ Martin Wolf, *Globalisasi : Jalan Menuju Kesejahteraan*, Yayasan Obor Indonesia : Jakarta, p. xii

² *Loc.cit.*

Tabel. 1 : Daftar negara terkaya di dunia berdasarkan PDB US\$ pada tahun 2011

No.	Negara	PDB 2011 (triliun US\$)
1.	Amerika Serikat	15,517
2.	China	7,492
3.	Japan	5,905
4.	Inggris	2,592
5.	Korea Selatan	1,202
6.	Belanda	893,7
7.	Turkey	774,7
8.	Swiss	696,3
9.	Norwegia	498,1
10.	Uni Emirat Arab	347,4

(Source:<http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&type=metadata&series=NY.GDP.MKTP.CD> (diakses pada : 26 November 2015, pkl. 12:08 WIB))

Hal tersebut merupakan contoh dari beberapa negara yang mampu mengambil keuntungan dari kesempatan – kesempatan yang dihadirkan oleh globalisasi, yang sekaligus menghindari bahaya – bahaya yang datang secara bersamaan. Sehingga, dalam jangka waktu yang cukup panjang, perekonomian di negara – negara yang sedang berkembang mengalami pertumbuhan yang cepat, meskipun sempat terhenti pada saat terjadi krisis keuangan yang cukup parah pada 1997.³

Martin Wolf berpendapat bahwa ekonomi dunia tidak seharusnya terpecah belah, justru akan lebih baik jika ekonomi dunia itu dapat terintegrasi seperti halnya yang telah berfungsi di Amerika atau paling tidak Uni Eropa. Ia juga berpendapat bahwa kegagalan dunia ini bukanlah karena banyaknya fenomena globalisasi terjadi, namun justru karena terlalu sedikit fenomena tersebut terjadi, dan di samping itu juga potensi bagi adanya integrasi ekonomi yang lebih besar belum tergali. Jika ingin menaikkan

³ *Ibid*, p. xvi

standar hidup orang miskin di dunia, maka pasar global yang dibutuhkan harus lebih banyak, bukan sebaliknya. Di samping itu, pemerintah juga harus bisa bersatu untuk memelihara dan meningkatkan ekonomi global tersebut.

Globalisasi melibatkan sebuah proses pengembangan perdagangan dunia dan peningkatan mobilitas faktor produksi. Pada saat ini, investor memindahkan modal mereka dengan kecepatan kilat, dan masyarakat bermigrasi menuju kota atau luar negeri untuk menghindari kemiskinan dan permasalahan politik. Muncul pendapat bahwa globalisasi membentuk peluang untuk banyak orang yang ingin keluar dari kemiskinan dan menganggapnya sebagai sarana yang baik untuk melakukan perubahan.⁴

Jagdish Bhagwati dari Columbia University meyakini bahwa globalisasi juga didukung dengan adanya liberalisasi perdagangan, yang ditandai dengan adanya perdagangan bebas. Pada saat ini, pendukung globalisasi sedang menghadapi para penentang adanya liberalisasi perdagangan yang juga mengatasnamakan moral yang jauh lebih tinggi, yang secara teknis mendefinisikan globalisasi sebagai integrasi kegiatan ekonomi, lintas batas, melalui pasar. David Henderson yang merupakan mantan kepala *The Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), mendefinisikan globalisasi sebagai proses pergerakan barang, jasa, buruh dan modal, sehingga kemudian menciptakan satu pasar tunggal dalam hal ekspor

⁴ Maria Brower, *Governance and Innovation : A Historical View.*, Routledge : London and New York., p. 2

dan impor; dan perlakuan yang bersifat nasional terhadap investor asing, sehingga dapat dikatakan tidak ada aktor asing dari segi ekonomi.

Brink Lindsey dari Cato Institute di Washington, dalam bukunya *Against the Dead Hand* mendefinisikan globalisasi yang disebut “globalisasi liberal” ke dalam tiga makna yang berbeda tapi saling berhubungan, yakni :

1. Menggambarkan fenomena ekonomi dari peningkatan integrasi pasar lintas perbatasan politik (baik disebabkan alasan politik maupun teknologi);
2. Menggambarkan fenomena politik yang terbatas mengenai runtuhnya rintangan – rintangan yang dipasang oleh pemerintah atas arus internasional barang, jasa, dan modal;
3. Menggambarkan fenomena politik yang jauh lebih luas mengenai persebaran kebijakan – kebijakan global yang berorientasi pasar, baik di lingkungan domestik maupun internasional.

Di samping itu, semakin diperkuat lagi dengan adanya pernyataan yang dikeluarkan oleh para pemimpin lembaga *Bretton Woods* (WTO, IMF dan *World Bank*) bahwa tujuan utama dari terbentuknya lembaga tersebut adalah untuk membantu kaum miskin di dunia. Mereka berpendirian bahwa gagasan terbaik menuju pertumbuhan adalah dengan menghilangkan sejumlah hambatan terhadap perdagangan perusahaan besar dan investasi keuangan. Hal ini merupakan jalan terbaik yang mereka tawarkan untuk keluar dari kemiskinan di era globalisasi.

Para penguasa lembaga tersebut menyatakan bahwa mereka yang secara terang – terangan menolak model globalisasi ekonomi justru akan merugikan kepentingan kaum miskin itu sendiri. Berbagai persoalan global yang terjadi baik dari perencanaan dan pemecahannya harus diserahkan kepada perusahaan – perusahaan dan birokrasi – birokrasi global. Masyarakat tidak perlu repot untuk menyelesaikan persoalan tersebut dan biarkan mereka yang memberikan keselamatan bagi kaum miskin.

Namun, berbeda dengan berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pendukung globalisasi. Kaum anti-globalisasi mengeluarkan fakta yang mendukung penolakan mereka terhadap globalisasi, dan menambahkan pertanyaan besar tentang pertanggungjawaban janji – janji positif globalisasi yang sudah disebutkan sebelumnya. Bagi mereka, globalisasi justru memberikan masalah ketimpangan dan kemiskinan global, dan hal tersebut menjadi alasan yang besar atas penentangan mereka terhadap liberalisasi perdagangan, integrasi ekonomi, dan lainnya.

Sebagian dari mereka tidak menyukai globalisasi dikarenakan bahwa globalisasi dianggap telah menyebabkan eksploitasi manusia yang tinggi dan kerusakan lingkungan, globalisasi juga memperlebar pendapatan yang berbeda antara yang kaya dan miskin maupun diantara negara – negara. Korporasi besar multinasional akan menggantikan industri pribumi. Komunitas lokal akan kehilangan identitas budayanya dan kemudian tenggelam ke dalam budaya barat.⁵

⁵ *Loc.cit.*

Tabel. 2 : Daftar negara termiskin di dunia berdasarkan PDB US\$ pada tahun 2011

No.	Negara	PDB 2011 (ribu US\$)
1.	Liberia	1,545
2.	Republik Afrika Tengah	2,195
3.	Burundi	2,355
4.	Eritrea	2,607
5.	Sierra Leone	2,932
6.	Togo	3,756
7.	Malawi	5,627
8.	Zimbabwe	10,956
9.	Zambia	23,731
10.	Republik Demokrasi Kongo	23,849

(Source:<http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&type=metadata&series=NY.GDP.MKTP.CD> (diakses pada : 26 November 2015, pkl. 12:32 WIB))

Zimbabwe yang merupakan salah satu negara termiskin di dunia, menjadi fokus dalam pembahasan kali ini. Zimbabwe masuk ke dalam kategori miskin dikarenakan berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Bank Dunia pada tahun 2011 terhadap negara Zimbabwe, presentase dari total populasi yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional yakni 72.3 persen. Sedangkan, pada tahun 2014 Bank Dunia mengeluarkan data mengenai GDP negara ini yakni sebesar US\$ 13.66 miliar dengan total populasi 15.25 juta jiwa, dan hal tersebut tergolong pada negara dengan level pendapatan rendah menurut Bank Dunia.⁶ (Lihat Peta.1. halaman 11) Jika dilihat berdasarkan peta tersebut dapat dikatakan bahwa Zimbabwe merupakan negara *landlocked* yang dikelilingi oleh beberapa negara lainnya. Negara ini tidak memiliki fasilitas secara langsung terhadap lautan karena letaknya yang hanya memiliki daratan dan beberapa sungai.

⁶ data.worldbank.org/country/zimbabwe (diakses pada : 21 Oktober 2015, pkl. 19:47 WIB)

Peta.1. Negara Zimbabwe



(Source : http://www.lonelyplanet.com/maps/africa/zimbabwe/map_of_zimbabwe.jpg
(diakses pada : 26 November 2015, pk1. 13.11 WIB))

Fakta – fakta yang terpapar di depan menunjukkan kontroversi yang jelas. Ada negara yang mampu memanfaatkan peluang yang diberikan oleh globalisasi. Sebaliknya, ada negara yang tidak mampu memanfaatkan peluang yang diberikan oleh fenomena globalisasi, yang salah satunya contohnya adalah Zimbabwe.

B. Rumusan Masalah

“Mengapa Zimbabwe Tidak Berhasil Memanfaatkan Peluang dari Fenomena Globalisasi?”

C. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori *Governance* dan teori *Social Entrepreneurship* serta konsep kekuatan nasional, guna memahami dan mampu menjawab pokok masalah yang menjadi perhatian dalam tulisan ini.

C.1. Teori *Governance*.

Stoker menyatakan bahwa “*governance*” merujuk pada cara menguasai dengan mengatur batasan – batasan dalam setiap sektor publik dan swasta. *Governance* sendiri lebih terfokus pada mekanisme yang tidak hanya terpaku pada otoritas serta persetujuan pemerintah saja melainkan juga dibutuhkan partisipasi dari warganegara dan perangkat lainnya.⁷

The Asian Development Bank (ADB), memandang *governance* sebagai sebuah tata kelola kekuasaan dengan cara menjalankan manajemen sosial negara dan sumber daya ekonomi guna kebutuhan pembangunan. Hal tersebut terkait pada kualitas membuat institusi, implementasi dan menjalankan kebijakan secara efisien, efektif, adil dan pajak.⁸

Country Governance Assessment, 2005, menyatakan bahwa *governance* merupakan penggunaan otoritas politik, ekonomi, dan administratif guna mengatur sumber daya negara untuk keperluan

⁷ http://www.ombudsman.gov.ph/UNDP4/wp-content/uploads/2013/01/Module_I.pdf (diakses pada : 21 Oktober 2015, pkl. 16:38 WIB)

⁸ *Loc.cit.*

pembangunan. Hal tersebut terkait institusionalisasi dari sistem yang menyangkut warganegara, institusi, organisasi, dan kelompok masyarakat yang menyuarakan kepentingan serta hak mereka, dan menengahi perbedaan guna mencapai kebaikan bersama.⁹

United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pasific (United Nations ESCAP) dalam “*What is Good Governance?*”, menjelaskan bahwa Governance merupakan proses pembentukan kebijakan dan proses implementasi kebijakan tersebut. Governance dapat digunakan dalam banyak konteks seperti hal nya *corporate governance, international governance, national governance dan local governance*.¹⁰

The United Nations Development Programme (UNDP) dalam dokumen laporannya yang berjudul “*Governance for Sustainable Development Cluster*”, 1999, menyatakan bahwa *good governance* menjadi kunci utama yang menentukan apakah negara tersebut dapat membentuk dan melanjutkan peluang yang sewajarnya untuk masyarakatnya atau tidak.¹¹ *The United Nations Development Programme* (UNDP) juga menyatakan bahwa dengan membangun atau meningkatkan kapasitas dari *good governance* diyakini akan dapat membantu dalam menghapus kemiskinan, dimana

⁹ *Loc.cit*

¹⁰ United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pasific., *What is Good Governance*.,2009., p. 1

¹¹ United Nations Development Programme., *Governance For Sustainable Development Cluster*., 1999., p. 13

perkembangan manusia tidak dapat dilanjutkan tanpa pemerintah dan *governance*.¹² *Good governance* adalah sebuah proses dan struktur yang melindungi politik dan hubungan sosial – ekonomi.

Nilai utama dan prinsip *governance* memiliki arti yang penting untuk mencapai dan memelihara tujuan pembangunan yang diakui oleh negara anggota United Nations dalam Millenium Declaration pada tahun 2000, diantaranya :

- a. Partisipasi antara laki – laki dan perempuan dalam menyuarakan kepentingannya untuk pembuatan kebijakan;
- b. Kerangka hukum atau keadilan legal yang kemudian dijalankan dengan seimbang;
- c. Transparansi dalam membangun arus bebas informasi;
- d. Institusi dan proses percobaan untuk melayani *stakeholder* hingga dinyatakan layak;
- e. Menengahi perbedaan kepentingan untuk mendapatkan konsensus yang luas, mengambil kepentingan yang baik dari berbagai kelompok, memilih mana yang memungkinkan untuk ditempatkan dalam kebijakan dan berbagai prosedur;
- f. Kesempatan yang sama untuk laki – laki dan perempuan dalam memperbaiki atau memelihara apa yang diinginkannya;

¹² *Loc.cit.*

- g. Proses dan institusi memproduksi hasil bahwa pemenuhan kebutuhan masyarakat harus berasal dari hasil terbaik sumber daya yang ada;
- h. Akuntabilitas adalah persyaratan utama dari *good governance*.

Keseluruhannya sejalan dengan prinsip utama hak asasi manusia yang diatur dalam berbagai macam deklarasi dan konvensi dalam UN, yang kemudian dari ke delapan prinsip tersebut dirangkum menjadi tiga prinsip utama yakni partisipasi dan keikutsertaan, akuntabilitas dan aturan hukum serta kesetaraan dan tanpa diskriminasi.¹³

Berdasarkan delapan karakteristik tersebut, dapat terlihat bagaimana pentingnya dari terselenggaranya *good governance* sebagai jalan untuk mengentaskan kemiskinan yang selama ini menjadi masalah yang ditimbulkan dari globalisasi. Masalah kemiskinan yang terjadi di setiap negara Dunia Ketiga, khususnya dalam hal ini adalah negara Zimbabwe yang menjadi fokus dalam penelitian.

Governance merujuk pada alokasi dan latihan otoritas. Sistem *governance* mencerminkan siapa yang membuat keputusan. *Governance* juga mengindikasikan siapa yang memegang tanggungjawab untuk hasil dari keputusan tersebut dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi pembuat kebijakan. *Governance* meliputi keduanya yakni institusi dan organisasi. Institusi merupakan aturan dari permainan sebagai dokumen hukum dan

¹³ United Nations Development Programme., *Governance Principles, Institutional Capacity and Quality*., UNDP : New York., 2011., p.279

regulasi. Sebagai contoh institusi adalah hukum kontrak, hukum keluarga, hukum properti, dan keuangan. Para ahli ekonomi menyepakati bahwa “good institutions” merupakan hal yang paling mendasar untuk pembangunan ekonomi. Menegakkan hak kekayaan pribadi; penyelenggaraan legal kontrak; sebuah lembaga hukum yang independen serta pemerintahan eksekutif yang bersih dari korupsi merupakan cabang untuk memajukan pertumbuhan ekonomi. Hal yang sama digunakan untuk kemajuan finansial dan sistem moneter. Organisasi merupakan pemain yang memainkan permainan yang ditata oleh aturan.¹⁴

Dengan menggunakan teori *governance* kemudian diharapkan dapat membantu penulis untuk meneliti apakah kegagalan dari negara Zimbabwe untuk memanfaatkan peluang dari globalisasi merupakan kesalahan dari pemerintah Zimbabwe yang belum mencapai apa yang disebut dengan *good governance*. Sehingga, hal tersebut kemudian menjadikan negara ini menjadi negara yang tergolong dalam negara miskin dengan level pendapatan yang rendah.

Oleh karena itu, jika dilihat dari prinsi – prinsip yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka sangat diperlukan akan adanya penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, nyata dan pemerintahan yang sah. Sehingga, penyelenggaraan pemerintahan tersebut dan pembangunan di dalam negara kemudian dapat berlangsung secara berkesinambungan, memiliki daya guna yang tinggi, jujur, adil, bersih serta menghasilkan

¹⁴ Maria Brower., *Governance and Inovation : A Historical View.*, Routledge : Taylor & Francis e-Library., pp. xi - xii

pemerintahan yang bertanggung jawab dan bebas dari Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN).

Jika penerapan *good governance* ini dapat diterapkan di setiap negara miskin di dunia, maka hal tersebut lah yang kemudian dapat membantu megentaskan kemiskinan dalam suatu negara. Jika setiap negara miskin mampu mengentaskan kemiskinan yang terjadi di negaranya, maka hal itu akan mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan global. Di samping itu juga akan mampu mengurangi dampak dari kegagalan negara – negara dalam memanfaatkan peluang yang diberikan dari fenomena globalisasi.

C.2. Teori *Social Entrepreneurship*

James Austin mengatakan bahwa *Social entrepreneurship* adalah inofasi, aktifitas dalam membentuk nilai – nilai sosial yang dapat terjadi dalam atau untuk semua bidang baik nonprifit, bisnis maupun sektor publik.¹⁵

Sedangkan, Albert Cho menyatakan bahwa *Social entrepreneurship* merupakan seperangkat institusi yang dijalankan dengan mengkombinasikan pengejaran sasaran finansial dengan pengejaran dan promosi dari substantif dan nilai – nilai sambungan.¹⁶

Di samping itu, Francesco Perrini and Clodia Vurro dalam *Social entrepreneurship: Innovation and social change across theory and practice* juga menyatakan pendapatnya bahwa *Social entrepreneurship* merupakan perubahan promotor dalam masyarakat;

¹⁵ Johanna Mair, Jeffrey Robinson & Kai Hockerts., *Social Entrepreneurship*, Palgrave : New York, p. 4

¹⁶*Loc.cit.*

dimana mereka lah yang menjadi pelopor inovasi dalam sektor sosial, mengenai kualitas enterpreneur pada pemecahan ide, kapasitas mereka dalam membangun kecerdasan atau bakat, dan kemampuan mereka harus dengan nyata dapat menunjukkan kualitas dari ide – ide mereka, serta mampu menindak pengaruh sosial yang kuat. Keduanya mendefinisikan *Social entrepreneurship* sebagai dinamika proses, dimana membentuk dan mengaturnya dilakukan dengan sebagai individu atau pun kelompok (inovasi enterprener sosial), yang berjuang untuk memanfaatkan inofasi sosial dengan sebuah pemikiran entrepreneurial dan kekuatannya tersebut dibutuhkan untuk meraih prestasi, dalam rangka menciptakan nilai sosial baru dalam pasar dan komunitas yang lebih besar.¹⁷

Schultz dan Hatch (2005) telah berpendapat bahwa kita harus membagi “logika membangun manajemen praktis dari teori yang satu ke dalam teori lainnya”. *Social Entrepreneurship* adalah sebuah tempat yang ideal untuk mengimplementasi proses teori pembangunan berdasarkan praktik, tanpa melupakan teori dan pelaksanannya”.¹⁸

Dari beberapa pendapat tersebut, maka dapat dilihat bahwa jiwa *entrepreneurhip* dari masyarakat membantu untuk meningkatkan kemajuan dari suatu negara. Robinson dalam paper nya yakni : *How social entrepreneurs identify and evaluate opportunities*, mengatakan bahwa peluang *social enterpreneurhip* memiliki pengaruh yang besar dari sosial dan

¹⁷ *Loc.cit.*

¹⁸ J. Gregory Dees dan Beth Bettle Anderson., Framing a Theory of Social Entrepreneurship : Building on Two School of Practice and Thought, 2006, pp. 39-40

struktur institusional dalam pasar atau komunitas, yang dapat membuat rintangan untuk masuk. Sebagai konsekuensi, *Sosial Entrepreneurship* telah dilihat sebagai proses yang mana strategi digunakan untuk mengalamatkan sebuah permasalahan, dan keseimbangannya sangatlah penting sebagai proses untuk menafigasikan sosial dan batasan institusional untuk sebuah pasar atau komunitas. Sehingga *Sosial Entrepreneurship* dapat menemukan peluang atau tidak, tergantung pada pribadi dan pengalaman kerja masing – masing serta karakteristik dari pasar atau komunitas yang ingin dimasuki.¹⁹

Dengan menggunakan teori *Sosial Entrepreneurship*, kemudian diharapkan dapat membantu penulis untuk meneliti apakah kegagalan dari negara Zimbabwe untuk memanfaatkan peluang dari globalisasi merupakan akibat dari kurangnya partisipasi dari masyarakat untuk bersama – sama membangun ekonomi dalam negaranya bersama pemerintah, atau justru kegagalan tersebut dikarenakan masyarakat dari negara tersebut yang kurang memiliki inisiatif dan nilai juang untuk melakukan inovasi – inovasi dalam memanfaatkan sumber daya yang telah tersedia di dalam negaranya tersebut.

Terlebih lagi khususnya untuk Zimbabwe yang berdasarkan fakta negara ini termasuk pada lima besar negara termiskin di dunia pada tahun 2011 dengan level pendapatan rendah. (Lihat tabel.1) Terdapat kemungkinan bahwa hal tersebut disebabkan oleh kurangnya partisipasi dan inisiatif dari masyarakatnya untuk membuat inovasi – inovasi baru dari sumber daya yang disediakan dalam negaranya yang kemudian hal itu lah yang memicu negara

¹⁹ Johanna Mair, Jeffrey Robinson & Kai Hockerts, *Op.cit.* , p. 91

tersebut tidak mampu bersaing di era globalisasi ini, dan berdampak pada kegagalan mereka dalam memanfaatkan peluang yang besar dari fenomena globalisasi tersebut.

C.3. Konsep Kekuatan Nasional

Secara kontekstual dalam buku *International Relations : The Key Concepts* dikatakan bahwa kekuatan nasional dapat diartikan sebagai seluruh elemen kekuatan, seperti kemampuan militer, ekonomi, sumber daya dan besarnya populasi, serta hubungan salah satu dengan aktor lainnya. Sebuah negara mungkin muncul sebagai kekuatan yang besar karena memiliki banyak aset militer, tetapi kekuatan tersebut bisa jadi tidak mencukupi untuk melawan kemampuan musuh.²⁰

Secara khusus kekuatan (*power*) merupakan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Terdapat beberapa cara untuk mempengaruhi orang lain, dapat dengan cara memaksa atau mengancamnya, dapat juga dengan cara membujuknya dengan membayar mereka, atau juga dengan menarik dan mengajak mereka untuk menginginkan apa yang kamu inginkan.²¹

Politikus praktis dan orang biasa lebih sering memahami definisi *power* dengan definisi yang jauh lebih mudah dipahami, yakni sebagai kemampuan kepemilikan atas sumber daya yang dapat mempengaruhi hasil. Sebagai konsekuensinya, mereka menganggap bahwa sebuah

²⁰ Martin Griffiths and Terry O'Callaghan., *International Relations : The Key Concepts.*, 2002., p. 253

²¹ Joseph S. Nye, Jr., *Soft Power : The Means to Success in World Politics.*, Public Affairs : United States., 2004., p. 2

negara akan kuat jika ia memiliki populasi dan teritori yang relatif besar, sumber daya alam yang luas, kekuatan ekonomi, kekuatan militer, dan stabilitas sosial. Definisi tersebut baik karena membuat power kelihatan lebih nyata, terukur dan dapat diprediksi. Tetapi tidak sepenuhnya definisi tersebut benar, karena masalahnya beberapa dari mereka justru menemukan hal yang berbeda bahwa ternyata meskipun sudah memiliki *power* yang luar biasa, pada akhirnya tidak selalu mendapatkan hasil yang diinginkan.²²

Memiliki sumber kekuatan tidaklah menjamin akan selalu mendapatkan apa yang diinginkan. Merubah sumber daya ke dalam kekuatan yang sesungguhnya guna memperoleh hasil yang diinginkan membutuhkan strategi yang diatur dengan baik dan kepemimpinan yang cekatan. Seperti halnya dalam sebuah permainan, memang dengan menunjukkan siapa yang memegang kartu tertinggi sangat membantu dalam tahapan awal, namun sangatlah penting jika kita mengetahui permainan apa yang dimainkan, sehingga kita dapat mengetahui apa yang akan digunakan untuk melawannya, sehingga kita dapat memenangkan permainan. Seperti itulah gambaran bagaimana pentingnya untuk mengetahui strategi dan sumber kekuatan apa yang akan digunakan untuk mendapatkan apa yang diinginkan.

²² *Ibid.*, p. 3

Kekuatan secara historis dihubungkan dengan kapasitas militer. Meskipun demikian, salah satu elemen dari kekuatan tidak dapat mencerminkan kekuatan nasional. Bagian dari masalahnya adalah kenyataan bahwa istilah kekuatan dapat diartikan kedalam kapasitas untuk melakukan sesuatu dan praktik sebenarnya dari kekuatan. Dan saat ini, kemampuan negara untuk mengubah kekuatan potensial kedalam kekuatan operasional berlandaskan pada banyak pertimbangan, terutama hubungan antar politik dan psikologis seperti faktor – faktor efektifitas pemerintah dan persatuan nasional. Dalam konteks elemen kekuatan nasional, tidak mempedulikan bagaimana hal tersebut didefinisikan. Secara bersamaan, keduanya yakni konstitusi mereka atas sumber daya untuk pencapaian sasaran dan tujuan nasionalnya, serta mendekati sekutu menunjukkan bahwa kekuatan nasional itu dinamis.²³

Pada abad ke-18, kekuatan individual suatu negara dibuat agar dapat menjadi ukuran yang pasti baik terkait territorial, kekayaan, tentara, maupun angkatan laut. Yang kemudian pendekatan tersenut disusun kedalam “elemen kekuatan nasional”, yang kemudian merefleksikan analisis pendekatan “power” dalam buku *Politics Among Nations*.²⁴

Seperti yang dikatakan baik oleh Claude, Gulick, Haas dan Morgenthau bahwa Negara digambarkan sebagai aktor yang mencari

²³ *Ibid.*, p. 254

²⁴ David A. Baldwin., Power and International Relations dalam buku Handbook of International Relations., 2013., p.274

cara untuk memaksimalkan kekuatan relatif satu sama lain, yang kemudian akan menghasilkan *balance of power* atau mencari hasilnya. Hal tersebut kemudian menambahkan lebih banyak lagi jenis dari elemen kekuatan nasional, terkadang disebut “sumber kekuatan” atau “kapabilitas”. Pendekatan elemen kekuatan nasional menggambarkan kekuatan sebagai sebuah barang milik negara.²⁵

Dengan demikian, pendekatan elemen kekuatan nasional menjadi hal yang utama dalam pembahasan mengenai konsep kekuatan nasional ini. Jika berbicara mengenai kekuatan, maka terdapat dua bentuk dari kekuatan nasional yakni *soft power* dan *hard power*. Namun, ketika berbicara mengenai elemen kekuatan nasional, maka yang berkaitan dengan hal tersebut adalah sumber – sumber dari kekuatan nasional itu sendiri. Sedangkan, sumber kekuatan nasional sendiri berdasarkan bentuknya terdiri dari dua sifat yakni *tangible* dan *intangible*.

a. *Hard Power* atau *Tangible*

Setiap orang sangat akrab dengan *hard power*. Kita mengetahui bahwa kekuatan militer dan ekonomi seringkali membuat orang lain merubah kedudukan atau posisinya. *Hard power* dapat berupa bujukan (*carrots*) atau ancaman (*sticks*). Dengan kata lain *hard power* merupakan kemampuan untuk

²⁵ *Loc.cit.*

merubah apa yang dilakukan oleh orang lain, dengan memaksa atau membujuknya.²⁶

Kapasitas seorang aktor dalam memperoleh perhatian dari apa yang dimilikinya, yang kemudian digunakan untuk memaksa aktor lain atas apa yang diinginkannya. *Hard power* dapat meletakkannya dalam bujukan “carrots” atau ancaman “sticks”.²⁷ Hal tersebut dimungkinkan terjadi dengan bantuan sumber kekuatan nasional yang bersifat *tangible*, baik terkait kekuatan ekonomi yakni sumber daya alam, luas wilayah, jumlah penduduk, maupun kekuatan militer.

Kekuatan militer dan kekuatan ekonomi keduanya merupakan contoh *hard command power* yang dapat digunakan untuk membuat orang lain merubah posisinya atau keputusannya.²⁸ Kekuatan militer dipahami sebagai contoh asli dari *hard power*, hanya muncul menjadi sebuah pengertian dari karakteristik *hard power*, semenjak itu dapat juga digunakan untuk menghasilkan *soft power*.²⁹

²⁶ Joseph S. Nye, Jr., *Soft Power : The Means to Success in World Politics.*, *Op.Cit.*, p. 5

²⁷ Joseph S. Nye Jr., *Power in A Global Information Age : From Realism To Globalization.*, Routledge : London and New York., 2004., p. 5

²⁸ *Loc.cit.*

²⁹ David A. Baldwin., *Op.Cit.*, pp. 288 - 289

b. *Soft Power* atau *In-Tangible*

Kapasitas seorang aktor dalam memperoleh perhatian dari apa yang dimilikinya, yang kemudian digunakan untuk mendapatkan mempengaruhi aktor lain atas apa yang diinginkannya. Atau dengan kata lain memperoleh perhatian dengan menggunakan daya tarik daripada memaksa ataupun membayar. Seperti yang didefinisikan oleh Nye dalam bukunya *In The Future of Power* bahwa “*soft power* merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain melalui cara *co-optive* dari bingkai agenda, membujuk, dan menimbulkan daya tarik positif dalam rangka memperoleh hasil yang jauh lebih banyak”.³⁰

Menurut Nye dalam “*Power in A Global Information Age : From Realism to Globalization*”, mengatakan bahwa *soft power* adalah menjadikan orang lain untuk mau menghasilkan apa yang kamu inginkan, dengan memilih orang tersebut untuk menjadi bagian dari anggota dari pada dengan cara memaksanya. Nye meyakini bahwa “Jika seseorang dapat meminta orang lain untuk melakukan sesuatu yang dia inginkan, maka dia tidak berhak memaksanya untuk melakukan apa yang tidak ingin orang lain tersebut lakukan. Jika sebuah negara menunjukkan nilainya dan

³⁰ *Loc.cit.*

orang lain ingin mengikutinya, itu secara pasti akan mengurangi korban/biaya.”³¹

Dalam buku “*Soft Power : The Means to Success in World Politics*”, Nye mengatakan bahwa sebuah negara mungkin mendapatkan apa yang diinginkannya karena negara lainnya mengagumi nilai – nilai mereka, menyaingi teladannya, berkeinginan untuk mencapai level kemakmuran dan keterbukaan, sehingga ingin mengikuti negara tersebut. Dalam hal ini, sangatlah penting untuk mengatur agenda dan menarik lainnya dalam politik dunia, dan tidak hanya memaksa mereka untuk berubah dengan mengancam kekuatan militer atau persetujuan ekonomi. Lebih tepatnya soft power membuat orang lain untuk menginginkan juga apa yang kamu inginkan dan lebih memilih untuk mengajak mereka bekerjasama dibandingkan dengan memaksanya.³²

Pemimpin politik telah lama memahami bahwa kekuatan datang dari daya tarik. Maka Nye meyakini bahwa jika seseorang dapat membuat orang lain menginginkan apa yang dia inginkan, maka dia tidak perlu menggunakan hadiah atau ancaman untuk membuat orang lain melakukannya. Soft power tidak melulu sama dengan pengaruh. Soft power lebih dari sekedar mengajak atau kemampuan untuk merubah orang lain dengan perdebatan

³¹ Joseph S. Nye Jr., *Power in A Global Information Age : From Realism To Globalization.*, *Op.Cit.* p. 5

³² Joseph S. Nye, Jr., *Soft Power : The Means to Success in World Politics.*, *Op.Cit.*, p. 5

(meskipun itu semua juga merupakan suatu bagian yang penting dari soft power). Tetapi soft power juga berbicara mengenai kemampuan untuk menarik dan daya tarik seringkali membuat orang mengikuti apa yang diinginkan oleh seseorang tanpa memberontak.³³ Dapat disimpulkan bahwa Soft power merupakan kemampuan untuk membentuk apa yang diinginkan oleh orang lain, dengan menggunakan daya pikat pada salah satu budaya dan nilai – nilai atau kemampuan untuk kebijakan - kebijakannya untuk mempengaruhi sekitarnya.

Seperti halnya *hard power*, guna menjalankan kemampuannya dalam *soft power* seorang aktor juga membutuhkan sumber kekuatan nasional, yang dalam hal ini sumber tersebut bersifat *In-tangible*. Kemampuan untuk membentuk preferensi cenderung menghubungkannya dengan sumber kekuatan *In-tangible* seperti sebuah budaya yang menarik, nilai – nilai politik dan institusi – institusi, serta kebijakan – kebijakan yang dilihat sebagai legitimasi atau memiliki wibawa moral. Hal yang perlu diingat adalah kekuatan militer juga dapat menjadi sumber yang bersifat *soft power*.

Hard power dan soft power sangatlah berhubungan karena aspek keduanya pada kemampuan mencapai tujuannya dengan mempengaruhi

³³ *Ibid.*, p. 6

tingkah laku orang lain. perbedaan antara keduanya adalah pada sikap dasarnya dan kenyataan sumber daya yang dimiliki.

Dari beberapa pendapat tersebut, maka dapat dilihat bahwa elemen – elemen dari kekuatan nasional baik yang bersifat *tangible* maupun *In-tangible* dari suatu negara, sangat membantu negara untuk meningkatkan pembangunan di dalam negara tersebut, meskipun perlu juga dilihat dari faktor lainnya diluar dari kekuatan nasional yang juga dapat mendukung pemanfaatan kekuatan yang dimiliki suatu negara tersebut. Dalam hal ini, kaitannya dengan peluang yang muncul dari fenomena globalisasi, suatu negara akan dapat memanfaatkan peluang itu apabila elemen dari kekuatan nasional dapat digunakan dengan baik oleh negara tersebut. Sehingga, kapasitas dari suatu negara untuk bersaing di dunia internasional akan meningkat.

Terlebih lagi khususnya untuk Zimbabwe yang berdasarkan fakta negara ini termasuk pada sepuluh besar negara termiskin di dunia pada tahun 2011 dengan level pendapatan rendah. (lihat tabel.1) Ada kemungkinan bahwa hal tersebut disebabkan oleh dukungan dari elemen – elemen kekuatan nasional dari negara ini yang kemudian hal itu lah yang memicu negara tersebut tidak mampu bersaing di era globalisasi ini, dan berdampak pada kegagalan mereka dalam memanfaatkan peluang yang besar dari fenomena globalisasi tersebut. Dengan menggunakan konsep kekuatan nasional, kemudian diharapkan dapat membantu penulis untuk meneliti apakah benar kegagalan dari negara

Zimbabwe untuk memanfaatkan peluang dari globalisasi merupakan akibat dari hal tersebut.

D. Hipotesis

Zimbabwe dianggap gagal memanfaatkan peluang dari fenomena globalisasi karena faktor kepemimpinannya tidak mendukung terbentuknya jiwa *entrepreneurship* dan *good governance*.

E. Jangkauan Penelitian

Dalam hal ini, untuk membatasi penelitian yang akan dilakukan maka jangkauan dari penelitian adalah dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2014. Dimana, pada rentan waktu tersebut merupakan masa tercepat dari adanya pengaruh besar globalisasi.

Hubungan Internasional kontemporer pun dimulai dari berkurangnya jarak, rentan waktu dan alat – alat yang mendukung hal tersebut. sebagai contoh perkembangan alat transportasi, alat komunikasi, internet, dan lain sebagainya, berlangsung di rentan waktu tersebut. Sehingga, secara langsung banyak memberikan data konkrit dari perkembangan globalisasi.

F. Sistematika Penulisan

BAB I berisi tentang pendahuluan mengenai judul yang diambil, latar belakang masalah yang berkaitan dengan judul, yang juga berisi beberapa pemaparan secara umum mengenai informasi tentang negara Zimbabwe. Di samping itu juga BAB ini memberikan gambaran umum terhadap makna dari globalisasi. Kemudian dari pemaparan tersebut muncul rumusan masalah. Setelah itu, BAB ini juga berisi tentang kerangka pemikiran yang akan

digunakan kemudian dalam proses menganalisa permasalahan dari rumusan masalah yang muncul. Pada BAB ini juga terdapat hipotesa dan juga jangkauan penelitian yang dapat digunakan untuk membatasi penulis dalam melakukan penelitian.

Adapun pada BAB II berisi tentang model globalisasi seperti apa yang dipahami dalam konteks permasalahan yang terkait dengan Rumusan Masalah yang diangkat, janji – janji globalisasi, serta manfaat globalisasi. Atau dapat dikatakan bahwa pada BAB ini akan terdapat dua pembahasan yang nantinya akan menunjukkan bagaimana gambaran dari globalisasi dan juga apa saja peluang yang diberikan oleh fenomena globalisasi tersebut.

Kemudian Pada BAB III berisi tentang profil geo-politik Zimbabwe yang diidentifikasi melalui elemen sumber kekuatan nasional Zimbabwe yang berkaitan dengan indikator – indikator untuk dapat memanfaatkan peluang globalisasi. Serta pencapaian atas sumber kekuatan nasional yang sudah diidentifikasi, apakah sumber kekuatan tersebut menjadi kelemahan atau kekuatan bagi negara Zimbabwe.

Pada BAB IV Berisi tentang hasil analisa berdasarkan penerapan elemen – elemen serta beberapa aspek dari teori *governance* dan *social entrepreneurship* yang kemudian diklasifikasikan pada kelemahan serta kelebihan dari penerapan *good governance* dan *jiwa entrepreneurship* pada negara Zimbabwe. Sedangkan, BAB V merupakan bagian yang berisi tentang kesimpulan dari penjelasan yang sudah dibahas dalam beberapa BAB sebelumnya.